

# **DAMPAK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KARET-RAKYAT TERHADAP KEHIDUPAN PETANI DI RIAU**

**IKIN SADIKIN<sup>1</sup> DAN RUDI IRAWAN<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor

<sup>2</sup> Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

## **ABSTRACT**

Meaning sense of this paper is to explain and to analyze development process (in smallholder rubber sub sector) that have done by the government in Riau Province. Agricultural system which plantation system is a compatible model with in local people. Afterwards for to explain reality and to phenomenon analysis and what dynamic happen in that development, so analysis and it's examine pressured to literacy study and others theory and to use information's. The development problems appear because of the modernization strategy that applied by the government less accommodating local potential's, with the result that local societies think that the development are not for them. And finally, development programs less popular in the societies and can not supported by the people, so consequences social change not yet.

**Keyword:** *Development, Smallholder Rubber, Farmer Income*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Selama ini telah banyak usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Kebijakan ini diterapkan karena adanya kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan masih tergolong "miskin" dan umumnya menggantungkan hidupnya dari kemurahan alam di sektor pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah melalui pembangunan daerah pedesaan melalui pengembangan perkebunan karet-rakyat. Hal ini cukup beralasan, karena sejak tahun 1967 samapi 2004 luas areal, produksi dan produktivitas karet-rakyat di Indonesia selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu masing-masing 2,34 juta ha/tahun, 0,85 juta ton/tahun dan 3,55 kw/ha/tahun dengan laju peningkatan masing-masing 1,49; 3,06 dan 1,56 persen/tahun (Dirjen Bina Produksi Perkebunan, 2004).

Perkebunan karet-rakyat di Propinsi Riau sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Umumnya diusahakan oleh petani dalam skala kecil (sempit) dengan sistem tradisional. Berbeda dengan yang diusahakan oleh perusahaan pemerintah/swasta, dimana pengusahaannya dilakukan dalam skala besar dengan sistem teknologi modern. Namun demikian, dilihat dari proporsi luasan, kebun karet-rakyat tetap mendominasi, sehingga usaha itu patut diperhitungkan, karena dapat menentukan dinamika perkaretan Indonesia.

Pada tahun 2004 luas perkebunan karet-rakyat (PR) di Riau mencapai 359.091 ha atau 12,97 % dari luas total PR Indonesia. Sementara luas PR di Indonesia mencapai sekitar 86 % dari seluruh luas perkebunan karet total 3,26 juta hektar (Dirjen Perkebunan, 2004). Ini merupakan potensi areal lahan perkebunan karet terbesar di dunia, meskipun sebagian besar pengelolaannya masih dilakukan oleh rakyat yang belum sepenuhnya menerapkan teknik dan manajemen usaha yang efisien.

Pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Setelah bibit karet ditanam kemudian dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang memadai, sehingga tingkat produktivitasnya masih rendah, yaitu hanya sekitar 5,49 kw/ha/th; disamping kualitas hasil olahan-karet juga tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah faktor pemilikan teknologi dan kemampuan sumberdaya petani masih rendah, sehingga sampai di pasaran, produk karet Indonesia dikenal sebagai yang bermutu rendah. Sementara produk karet dari negara *jiran*, seperti Thailand dan Malaysia tetap mampu menjaga kualitas karetnya, sehingga sampai sekarang masih menguasai pasaran karet Dunia.

Dengan fenomena tersebut, maka posisi Indonesia dalam eskalase perkaretan dunia saat ini menurun; padahal menurut Mubyarto dan Dewanta (1991) dalam periode sebelum PD-II sampai 1956 karet-alam Indonesia telah berhasil mencapai kejayaan, karena menjadi produsen karet-alam terbesar di Dunia. Kemudian, meski setelah itu ada *boom* harga karet-alam dunia yang cukup tinggi, namun *booming* harga karet tersebut hanya mampu meningkatkan jumlah areal kebun karet-rakyat saja dan belum mampu meningkatkan kualitas “bokar”. Karenanya data dari Dirjen Perkebunan (2001) menunjukkan, posisi Indonesia sejak 1990 hingga tahun 2000 tetap berada di posisi kedua setelah Thailand sebagai produsen karet-alam dunia.

Mubyarto dan Dewanta (1991) menyatakan: Meskipun dalam banyak publikasi meyakinkan tentang besarnya peranan dari industri karet yang memproduksi barang-barang konsumsi vital bagi masyarakat modern, namun kenyataan di pusat-pusat produksi karet-rakyat di Sumatera dan Kalimantan masih menyedihkan, karena kemiskinan yang serius masih mewarnai kehidupan para petani karet. Pendek kata, sampai tahap sekarang sudah banyak usaha pembangunan perkebunan karet-rakyat dilakukan pemerintah, tapi (relatif) masih belum mampu secara nyata mengangkat derajat hidup petaninya.

Dalam upaya untuk meraih kembali posisi Indonesia sebagai produsen karet-alam terbesar di dunia dan memperbesar peranan subsektor perkebunan dalam menyumbang devisa negara. Pemerintah perlu melakukan terobosan baru dalam membangun perkebunan

karet-rakyat, baik yang sudah ada maupun yang belum/dalam proses pengembangan. Sebab membangun perkebunan karet-rakyat, selain bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi atau *bokar*, juga pada hakekatnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup petani dan menghapus berbagai dimensi kemiskinan.

Banyak usaha telah dilakukan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan perkebunan karet-rakyat, seperti melalui SRDP<sup>1</sup>, PIR/NES<sup>2</sup>, TCSDP<sup>3</sup>, PRPTE<sup>4</sup>, dsb. Tapi strategi pembangunan (proyek) perkebunan yang ditempuh saat itu bertujuan untuk meningkatkan devisa negara melalui ekspor yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah *modernisasi* dengan mengadopsi dan menggunakan teknologi diberbagai bidang pertanian (seperti pemakian bibit unggul, pupuk kimia, pengendalian hama/penyakit, dll, sampai ke teknik-teknik pengolahan).

Tingkat pendapatan mayoritas penduduk Riau yang *notabene* petani pekebun adalah masih rendah, karena tingkat produksi masih rendah, yaitu sekitar 3-5 kw/ha/thn. Kenyataan ini sangat ironis, sebab dengan berbagai proyek yang telah dikembangkan oleh pemerintah sepertinya belum membuahkan hasil yang signifikan terhadap kesejahteraan hidup petani, padahal sumbangan sektor perkebunan terhadap pendapatan daerah maupun nasional sangat besar (Rusli dkk, 1996).

### **Perumusan Masalah**

Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya di subsektor perkebunan belum begitu banyak berarti dalam rangka meningkatkan kemakmuran kehidupan petani, sebab persoalan pembangunan, khususnya dalam perkebunan karet-rakyat, tidak cukup hanya sekedar meningkatkan produksi semata. Artinya strategi pembangunan yang diterapkan pemerintah selama ini yang mengacu hanya kepada landasan asumsi-asumsi ekonomi neo-klasik, perlu ditinjau kembali, sebab dalam paradigma itu manusia hanya dipandang dari satu sisi, yaitu sebagai makhluk rasional yang hanya terangsang oleh insentif material. Hal ini terbukti dalam realitas kehidupan sosial/ekonomi petani selama ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Karenanya untuk mengurai berbagai persoalan yang dihadapi dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saat ini sudah seharusnya mempertimbangkan potensi sumberdaya lokal, sebab telah dimiliki, melembaga dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.

---

<sup>1</sup> Smallholder Rubber Development Project.

<sup>2</sup> Perkebunan Inti Rakyat/Nucleus Estate Smallholder.

<sup>3</sup> Three Crops Smallholder Development Project.

<sup>5</sup> Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor.

Berkait dengan hal tersebut, maka permasalahan yang perlu diketahui dan dicari jawabannya adalah: *pertama*, sejauh mana usaha pembangunan perkebunan karet-rakyat yang telah dilakukan pemerintah selama ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani; *kedua*, apakah pembangunan perkebunan juga telah mampu menciptakan perubahan (sosial, kultural) yang lebih baik untuk masyarakat sekitar, dan *ketiga*, apakah usaha pembangunan tersebut sudah memanfaatkan berbagai potensi sosial dan budaya masyarakat lokal yang menciptakan suatu perubahan, misalnya tradisi-tradisi, lembaga-lembaga norma, dan adat masyarakat. Selanjutnya apakah pembangunan tersebut juga turut memberdayakan lembaga lokal atau kelompok sosial yang menunjang pembangunan perkebunan karet tersebut.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pembangunan adalah sebuah kata kunci yang selama ini sering disosialisasikan oleh pemerintah sebagai lembaga untuk menyejahterakan rakyat; seolah-olah berbagai persoalan mendasar yang berkembang dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat dapat diselesaikan dengan adanya pembangunan. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan yang dipilih dan dilakukan oleh pemerintah di suatu Negara berlainan coraknya, sebab istilah pembangunan bisa dimaknai secara berbeda oleh setiap orang/pemerintahan. Banyak hal yang bisa menimbulkan perbedaan, salah satunya adalah karena adanya perbedaan cara pandang dalam mengejar masa depan yang lebih baik. Berkait dengan pemaknaan terhadap konsep pembangunan, terlebih dulu akan dikemukakan beberapa makna yang terkandung dalam istilah pembangunan tsb, sebab selama ini, istilah pembangunan sering dimaknai dengan modernisasi (*modernization*), pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan perubahan sosial (*social change*).

Menurut Schoorl (1980), modernisasi adalah penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktivitas, bidang kehidupan atau semua aspek masyarakat. Pendapat ini dapat diartikan, jika suatu masyarakat atau bangsa ingin membangun maka harus menghilangkan semua unsur yang tidak rasional. Dengan kata lain segala sesuatu yang sifatnya tradisional harus dihindarkan, karena dapat menghambat langkah modernisasi pada tahap-tahap selanjutnya. Konsep Schoorl hampir sama dengan pendapat Wilbert Moorre (Long, 1987). Menurutnya konsep modernisasi adalah suatu transformasi secara menyeluruh masyarakat tradisional atau masyarakat pra-modern menjadi masyarakat yang bercorak teknologi dan organisasi sosialnya seperti yang terdapat di negara-negara dunia Barat yang maju, makmur secara ekonomik dan relatif stabil secara politis.

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan *pertama*, problem keterbelakangan di segala aspek/kehidupan yang ada di Dunia ketiga dapat diselesaikan dengan pembangunan yang menerapkan strategi modernisasi. Artinya mereka memandang bahwa kerumitan persoalan di Dunia ketiga seperti masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan dll akan dapat di atasi dengan modernisasi. Dengan demikian aspek yang paling menonjol dalam modernisasi ini adalah perubahan teknik produksi (industri) dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern; karena inspirasi modernisasi di dunia Barat dihasilkan oleh adanya revolusi industri yang terjadi di Inggris. Dimana setelah revolusi industri, muncul, pemahaman seluruh aspek persoalan kehidupan akan dapat diselesaikan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi. *Kedua* adalah bahwa pembangunan juga mengindikasikan adanya suatu transformasi atau perubahan dari satu jenis aktivitas ke aktivitas lain, misalnya dalam bidang ekonomi.

Proses pembangunan yang dilaksanakan dengan strategi modernisasi, kemudian diasumsikan akan mampu menggerakkan sektor ekonomi. Karena dengan berkembangnya teknologi dan industri, maka perekonomian dengan sendirinya akan mengikuti laju kecepatan sektor industri. Oleh karena itu pembangunan dengan strategi modernisasi tidak akan mampu mengisolasi faktor ekonomi yang dengan sendirinya akan mengikuti langkah dan arah perubahan proses tersebut. Tetapi justru sebaliknya, seperti yang diungkapkan oleh Smelser *dalam* Long (1987), bahwa usaha ini sebagai suatu upaya untuk memadukan dan memberikan perubahan sosial ekonomi. Karena pada dasarnya pembangunan ekonomi-di pedesaan yang berlangsung akan memberikan implikasi terhadap: (a) perubahan dari cara-cara tradisional kepada aplikasi ilmu pengetahuan yang berrasionalitas tinggi, dan (b) munculnya pertanian komersial, dimana proses ini dicirikan dengan adanya pergeseran dari sistem pertanian subsisten menuju ke pertanian sistem pasar.

Proses ini secara linier akan meningkatkan *output* (produksi) setiap individu/kelompok masyarakat yang selanjutnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat suatu bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain meningkatnya pendapatan per kapita penduduk merupakan suatu isyarat terhapusnya persoalan-persoalan ketertinggalan di negara-negara Dunia ketiga. Karena masih banyak negara/Pemerintahan di Dunia ketiga yang memaknai pembangunan hanya sebatas bertumbuhnya ekonomi, maka pembangunan disebut berhasil jika indikator ekonomi meningkat, jadi berhasilnya pembangunan hanya dilihat dari sisi kenaikan pendapatan nasional riil dalam jangka waktu tertentu (Thirwall *dalam* Ndraha, 1990).

Padahal tidak hanya demikian. Proses modernisasi itu sendiri sangat berkait dengan perubahan sosial, sebab perubahan sikap masyarakat dan lembaga-lembaga sosial merupakan prasyarat dalam modernisasi, sebagai konsekuensi dari modernisasi itu niscaya akan menghasilkan perubahan. Menurut Soemardjan (1962) perubahan sosial adalah perubahan lembaga-lembaga masyarakat (*institutions*) yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk tata nilai, sikap dan pola perilaku kelompok. Artinya modernisasi dapat tercapai jika terjadi adanya perubahan sikap masyarakat, lembaga-lembaga sosial terhadap nilai-nilai yang dibawa oleh langkah modernisasi tsb.

Berbeda dengan perubahan yang terjadi di negara Barat. Perubahan sosial yang terjadi di Dunia ketiga awalnya lebih banyak digerakkan, dirangsang dan diapengaruhi oleh adanya keterlibatan pengaruh berbagai kekuatan *ekstraterestrial*, yaitu kekuatan yang berasal dari luar desa atau kekuasaan atas desa (Long, 1987). Karena itu pemerintahan di negara-negara Dunia ketiga kemudian sering membuat lembaga (formal) tertentu di tingkat desa dengan tujuan untuk memacu modernisasi, pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Meskipun dalam proses pembangunan untuk mewujudkan perubahan itu tidak netral dari berbagai hambatan/tantangan yang berasal dari unsur dalam desa sendiri.

Pada dasarnya ada dua faktor penghambat perubahan sosia (Horowitz *dalam* Ndraha, 1980), yaitu yang bersifat kolektif (*collective resistance*) dan yang bersifat individual. Tantangan yang bersifat kolektif, biasanya dilakukan atas dasar keamanan dan ketertiban, sedangkan tantangan yang bersifat individual biasanya bersifat intelektual. Kedua tantangan ini dilandasi oleh ketakutan akan hancurnya tradisi, sebagai milik masyarakat yang telah dipegang secara temurun. Sedangkan menurut Evers (1988), tantangan perubahan sosial dalam masyarakat Dunia ketiga justru datang dari kaum elite yang biasanya dianggap sebagai agen perubahan; terlebih lagi, jika perubahan tersebut merugikan kepentingan kalangannya sendiri. Disinilah penting adanya unsur fleksibilitas sosial agar proses pembangunan yang dilakukan melalui modernisasi dapat berlanjut dan memberi manfaat bagi masyarakat banyak, sebab menurut Eisenstadt *dalam* Long (1987), modernisasi dapat dilanjutkan hanya kalau masyarakat dapat mengembangkan unsur fleksibilitas, berusaha menyelesaikan masalah-masalah baru yang selalu berubah dan mau menerima lingkungan institusi sentral. Meskipun demikian diharapkan institusi sentral yang dibangun di pedesaan bersifat lebih adaptif dengan kondisi lokal di tempat institusi itu berada.

Jadi dengan beragamnya makna yang terkandung dari konsep ataupun teori-teori pembangunan tersebut akan digunakan untuk menganalisis suatu teorema pembangunan yang dipilih oleh pemerintah menjadi suatu kebijakan dalam melakukan strategi pembangunan

perkebunan karet-rakyat di Propinsi Riau yang telah memiliki pengaruh dan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat petani disekitarnya. Pembahasan selanjutnya akan merekonstruksi teorema suatu proses pembangunan perkebunan karet-rakyat di Propinsi Riau dari sisi sosiologi, yang dimulai dengan ulasan sejarah perkaretan di Riau.

## PEMBAHASAN

### Sejarah Singkat Perkebunan Karet-rakyat dan Kondisi Petani di Riau

Tanaman karet mulai dikenal dan dibudiyakan oleh masyarakat di Propinsi Riau, berkaitan dengan sejarah perkaretan di Indonesia. Karet mulai dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yang awalnya ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman baru-koleksian (Penebar Swadaya, 1992). Dan selanjutnya tanaman karet dikembangkan menjadi tanaman perkebunan dan tersebar di beberapa daerah.

Adanya krisis tembakau dan kopi yang menjadi komoditas andalan pemerintah kolonial Hindia Belanda (HB), mendorong pemerintahan HB untuk membangun perkebunan karet (PK). Pada tahun 1864, PK mulai diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia, dengan pertama kali dibuka di daerah Pamanukan dan Ciasem (Jawa Barat) oleh Hofland-perusahaan Belanda. Jenis tanaman karet yang ditanam di waktu itu adalah karet “rambung” (*Ficus elastica*). Dan karet jenis *Hevea brasiliensis* baru ditanam di Sumatera Timur, tahun 1902. PK di Indonesia lebih berkembang setelah *Netherlands Indies* membuka pintu bagi para investor asing, terutama dari Inggris, Belanda dan Belgia serta Amerika. Seiring dengan itu, pemerintah HB untuk pertama kalinya memperkenalkan sistem perkebunan besar (modern) yang dibuka di daerah Indragiri pada 1893. Selanjutnya disusul oleh perkebunan-perkebunan lainnya. Sehingga pada 1915, di seluruh Kepulauan Riau, Indragiri dan Kuantan terdapat 12 *onderneming*.<sup>5</sup> Tanah-tanah *erfpacht*<sup>6</sup> yang luas di Japura, Kelawat, Sungai Lalak, Sungai Parit Gading, Air Molek dan Sungai Sagu, kemudian dimanfaatkan untuk ditanami pohon karet (Penebar Swadaya, 1992).

Seiring dengan perkembangan permintaan karet-alam Dunia, terutama setelah adanya pengaruh “boom” harga karet-alam setelah PD II. Perkebunan karet yang dikelola oleh rakyat (perkebunan rakyat) sudah terlebih dahulu di kenal masyarakat Riau, bahkan jauh sebelum diperkenalkan oleh pemerintah kolonial HB. Petani mendapatkan benih atau bibit tanaman karet dari para jemaah haji yang singgah di Malaysia atau Singapura. Selain itu pedagang-pedagang Cina (Malaysia dan Singapura) yang membeli produksi karet-rakyat,

---

<sup>5</sup> Perkebunan pemerintah Hindia Belanda

<sup>6</sup> Tanah yang disewa oleh perusahaan swasta dari pemerintahan Hindia Belanda untuk perkebunan.

juga sering membawakan benih-benih karet untuk ditanam. Karena itu tanaman karet sudah merupakan bagian dari budaya kehidupan para petani di Riau. Selain didukung oleh kondisi alam, juga sistem pertanian-kebun bagi masyarakat Riau merupakan suatu bentuk adaptasi di bidang pertanian, karena cengkraman iklim dan kesuburan tanah di Riau yang tidak sebaik di Jawa yang sarat dengan intensifikasi tanaman pangan, maka disebut oleh Rusli dkk (1996), subsektor perkebunan di Propinsi Riau melaju lebih cepat dibanding dengan sektor pertanian tanaman pangan.

Jadi budaya petani-kebun yang mendasari kehidupan penduduk di Riau adalah kehidupan pertanian yang berpusat pada lahan kering. Sehingga tanaman-tanaman utama yang telah lama menjadi kesukaan dan seting budaya mereka adalah tanaman karet dan kelapa. Sementara, tanaman kelapa sawit baru berkembang pada zaman prakemerdekaan. Kebanyakan perkebunan kelapa sawit yang ada di Propinsi Riau dikelola oleh pemerintah (BUMN) ataupun perusahaan swasta besar yang melibatkan hanya segelintir penduduk sebagai tenaga buruh harian atau kerja borongan kasar.

### **Kondisi Sosial Ekonomi Petani Karet dan Wajah Desa: Realitas Empiris**

Asumsi-asumsi umum yang sering dipakai selama ini adalah keadaan sosial ekonomi petani karet mempunyai hubungan dengan hasil produksi karet-rakyat. Ini berarti, usaha peningkatan produksi dan mutu karet-rakyat secara otomatis akan meningkatkan kondisi sosial ekonomi petani. Dengan kata lain peningkatan produksi dan mutu hasil kebun menjadi tidak berarti, jika keadaan sosial ekonomi petaninya tidak berubah. Untuk itu usaha yang sering dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi petani karet adalah melalui peningkatan pendapatan.

Kalau dilihat besarnya pendapatan petani karet tradisional di Riau yang dihimpun dari data Dinas Perkebunan Propinsi Riau (1991) dalam hasil penelitian Rusli dkk (1996), rata-rata pendapatan per bulan hanya mencapai Rp.28.230. Tingkat pendapatan seperti ini jelas secara *gamblang* akan berdampak kepada kesulitan petani untuk dapat memelihara kebun karetnya agar mampu menghasilkan produksi yang lebih baik. Jangankan memelihara kebun, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pun sangat minim. Pada akhirnya keadaan sosial ekonomi petani karet yang masih kurang memadai, dilihat dari sisi pendapatan dan distribusinya berakibat pada pemeliharaan tanaman karet yang kurang intensif. Dan pada gilirannya tentu produksi karet-rakyat pun tidak akan mampu memberikan harga yang layak bagi kehidupan petaninya. Kondisi demikian sesungguhnya terjadi juga pada petani karet-rakyat di Propinsi lainnya, seperti Jambi, Sumsel, Kalbar, dan Sumbar (Thahar, 2000).



Kondisi sosial ekonomi petani yang sangat rawan (terdesak oleh kebutuhan ekonomi rumah tangga) ini sering dimanfaatkan oleh pihak luar (*toke*, tengkulak) melalui pemberian bantuan finansial (hutang) sehingga lama-kelamaan akibatnya para petani karet menjadi semakin sulit keluar dari ikatan hutang-piutang. Karenanya petani tidak pernah memiliki posisi tawar yang sesuai dengan kewajaran. Dan jika kondisi seperti ini terus berlangsung, maka petani tidak akan mampu menghilangkan masalahnya sendiri, untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang melilitnya.

Kondisi sosial ekonomi petani karet tersebut sebetulnya hanya menggambarkan bagaimana sesungguhnya wajah petani karet di pedesaan di Propinsi Riau dan juga di daerah pedesaan lain di Indonesia. Artinya, kehidupan masyarakat pedesaan di Propinsi Riau yang masih didominasi oleh para petani karet-rakyat (basis agraris), kehidupannya masih dalam serba kekurangan dan derajat kesejahteraannya masih rendah. Menurut Rusli dkk (1996), jumlah desa miskin yang terdapat di Propinsi Riau tahun 1990 mencapai 291 desa dari total 1.142 desa dan pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan Riau mencapai 572,6 ribu orang atau 18,08% (BPS, 2003). Mungkin kalau diadakan penelitian dan kajian lebih lanjut, tidak mustahil jumlah desa miskin ini akan semakin bertambah jumlahnya, karena adanya “badai” krisis multi dimensi berkepanjangan yang hingga sekarang masih terus bergulir.

### **Pemasaran Karet-Rakyat : Jaringan Bisnis Karet di Tingkat Bawah**

Rendahnya harga karet yang diterima oleh petani selama ini sering dituduhkan karena jeleknya kualitas produksi karet-rakyat. Sebaiknya ke depan, persoalan yang menimpa petani karet ini tidak dilihat hanya dari sisi rendahnya mutu karet yang dihasilkan petani karet-rakyat. Namun perlu juga dilihat dari sisi faktor penyebab lainnya, misalnya sisi hubungan sosial antara petani dengan pihak lain yang ada di tingkat lokal. Artinya, persoalan rendahnya harga (pendapatan) dan kehidupan petani tidak hanya disebabkan oleh persoalan teknis semata, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan situasi dan kondisi sosial masyarakat di tingkat bawah. Iklim sosial yang dimaksud adalah adanya kenyataan bahwa penentuan harga karet di tingkat bawah justru sering ditentukan oleh keterikatan hubungan sosial antara petani kecil, petani besar dengan pedagang karet di tingkat lokal yang menggiringnya ke sudut posisi tawar petani karet-rakyat menjadi lemah.

Kenyataan seperti ini, di pedesaan sulit sekali untuk dihindarkan. Keinginan yang besar dari petani untuk tetap menjaga ke-eratan hubungan sosial sering memaksa dan menghilangkan rasionalitas petani dalam berbisnis. Artinya, kebanyakan petani di pedesaan

lebih cenderung untuk menomor-satukan hubungan resiprositas sosial dibandingkan dengan keuntungan bisnis semata, meskipun bisnis karet tersebut merupakan penyokong kehidupan ekonomi keluarga. Realitas seperti ini bukan sesuatu yang mustahil adanya, karena sampai saat ini, di pedesaan masih banyak dijumpai para *toke* atau petani besar (*induk somang*), disamping berperan sebagai pembeli produksi karet, juga masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan petani produsen; baik itu sebagai mertua/famili, atau pemberi dana bagi kehidupan rumah tangga, dsb. Jadi karena hubungan *patron-client* tersebut sudah bercampur aduk dengan hubungan sosial kekeluargaan, maka hubungan resiprositas dan keterikatan sosial tersebut, secara implisit pada akhirnya menjadi *rikuh-pakewuh* dan dapat menyulitkan posisi petani dalam adu tawar-menawar dalam proses penentuan harga bagi produksi karetnya. Karenanya kebanyakan mereka, suka atau tidak, terpaksa atau rela, mereka pasrah dan menerima harga yang telah ditentukan (sepihak) oleh para *toke* atau *induk somang*-nya.

Variabel lain yang juga berperan ikut menentukan tingkat pendapatan petani adalah rantai pemasaran karet, sebab kenyataan menunjukkan bahwa begitu banyaknya lapisan pedagang yang terlibat, sehingga menjadikan rantai tataniaga karet di sini cukup panjang, dan kondisi demikian sudah merupakan suatu fenomena lama. Petani tidak pernah bisa langsung dalam memasarkan produksi karetnya kepada pabrik atau pedagang eksportir. Paling kurang mereka harus melalui dua atau tiga orang pedagang perantara yaitu pedagang di tingkat desa dan pedagang di tingkat kecamatan. Meski disadari; rantai tataniaga yang pendek sulit dijumpai, karena umumnya sentra produksi karet-rakyat di Riau relatif jauh dari pusat kota dengan kondisi jaringan transportasi yang kurang memadai. Karenanya petani harus melalui rantai pemasaran yang panjang dan berliku, mulai dari pedagang ditingkat kelompok, di tingkat desa, pedagang di tingkat kecamatan, sampai ke pedagang agen-komisi, baru masuk ke pabrik pengolahan atau eksportir karet.

Panjangnya rantai tataniaga itu berakibat kepada rendahnya harga jual di tingkat petani, karenanya petani hanya bisa menerima harga karet apa adanya. Mubyarto dan Dewanta (1991) menyebutkan bahwa dengan adanya rantai tataniaga yang panjang tersebut petani karet di Sumatera dan Kalimantan hanya menerima sekitar 25-30% dari harga ekspor karet-alam. Bandingkan dengan pendapatan petani karet di negara *jiran* Malaysia yang mampu menerima paling kurang 70-80% dari harga ekspor karet-alam. Jadi tidak mustahil bila kehidupan sosial ekonomi petani karet di pedesaan Riau masih rendah dan jauh tertinggal. Dengan begitu, meskipun produksi karet-rakyat tinggi, tapi menjadi tidak banyak berarti karena tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petaninya. Untuk itu penting

adanya perhatian pemerintah terhadap upaya pembangunan perkebunan karet-rakyat yang mampu memberikan dampak positif terhadap perbaikan derajat hidup petani.

## **PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KARET-RAKYAT DI RIAU**

### **Strategi Kebijakan Pembangunan**

Adanya kenyataan bahwa kondisi sosial dan ekonomi petani di pedesaan kurang baik, Pemerintah Indonesia dewasa ini semakin intensif melaksanakan berbagai program pembangunan di daerah pedesaan. Kartodirdjo (1990) menyebut istilah itu dengan *syndrome* pedesaan. Jadi, jika akan memecahkan berbagai persoalan di pedesaan, maka harus bertitik tolak dari *syndrome* tersebut. Menurutnya ada dua jenis *syndrome* pedesaan, yaitu *syndrome* kemiskinan (berkait dengan rendahnya produktivitas, pengangguran, tuan tanah, dan kurang gizi) dan *syndrome inertia* (adanya sifat serba patuh, pasivisme, fatalisme dan ketergantungan) yang sudah lama berakar. Kedua *syndrome* ini merupakan persoalan pokok yang sudah laten yang perlu segera dipecahkan dalam program pembangunan. Dengan upaya mengatasi kedua *syndrome* tersebut diharapkan semua sumberdaya alam dan manusia yang sangat potensial di negeri ini dapat dikembangkan untuk mempertinggi martabat kehidupan rakyat.

Upaya untuk mengatasi persoalan pedesaan di Riau, sejak tahun 1970-an pemerintah (Pusat dan Daerah) telah melakukan pembangunan dengan menerapkan strategi modernisasi. Secara umum strategi yang diterapkan untuk membangun perkebunan karet-rakyat adalah melalui cara: *Pertama*, pemerintah membentuk pusat-pusat pengolahan karet di beberapa daerah sentra produksi, dengan sasaran untuk menampung dan mengolah lateks dari hasil perkebunan rakyat. Program ini bertujuan untuk memperbaiki mutu olahan karet-rakyat. *Kedua*, melakukan pembinaan perkebunan rakyat dengan membentuk unit pelaksana proyek (UPP). Di daerah Propinsi Riau, program ini lebih dikenal dengan istilah proyek SRDP. Sistem ini diharapkan mampu berfungsi sebagai pembina petani karet secara menyeluruh, meliputi dari masalah penanaman hingga persoalan pemasaran.

Strategi program pembangunan yang diterapkan pemerintah tersebut selain untuk memperbaiki kondisi pendapatan petani, juga dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial petani. Strategi dan program *pertama* dilaksanakan hampir di seluruh daerah yang menjadi sentra-sentra produksi karet-rakyat di Riau. Di tahap-tahap awal pelaksanaan program ini banyak sekali petani yang merespon positif. Karena dipandang dalam menyukseskan program tersebut, pemerintah

mengeluarkan seluruh daya dan upayanya, meskipun tidak jarang ada unsur pemaksaan dari oknum agar petani berkenan membawa *ojol*-nya ke pusat pengolahan yang dibangun oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan target proyek, karenanya kurang memperdulikan jenis-jenis keluhan petani yang ada. Pola seperti ini sebenarnya merupakan pola yang tidak dikehendaki oleh petani, karena menurut pandangannya dalam pelaksanaan program ini, pemerintah cenderung memaksakan kepentingannya sendiri untuk mengejar target pembangunan yang telah ditetapkan lebih dahulu di belakang meja.

Salah satu keluhan para petani dalam pelaksanaan program ini adalah kesulitan untuk mematuhi peraturan dalam kriteria standar kadar karet-kering tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Kebiasaan petani sebelumnya tidak pernah memperhatikan kriteria standar kadar karet kering ini. Tapi setelah masuknya program pemerintah tsb, justru banyak sekali peraturan yang dianggap membebani kegiatan usahatani karet mereka. Hal ini jelas merugikan petani, karena pengalaman berkebun karet selama turun-temurun, persoalan ini tidak pernah menjadi hambatan, dan kenyataannya *ojol* mereka juga laku terjual atau dibeli oleh para tengkulak.

Seiring dengan perjalanan waktu, program pemerintah ini pada akhirnya kalah bersaing dengan para tengkulak dan *induk somang* dalam menampung produksi karet-rakyat. Karena para tengkulak dan *induk somang* lebih banyak mengetahui apa yang diinginkan oleh para petani, disamping mereka telah lama menjalin hubungan sosial dengan pekebun karet. Sementara Pemerintah dalam koridor untuk menyejahterakan rakyatnya, selain hanya mengejar target kepentingannya sendiri, juga justru sering menganggap terhadap para tengkulak dan *induk somang* sebagai musuh petani dan musuh pemerintah dalam pemasaran karet-rakyat. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah hubungan antara petani dengan para tengkulak dan *induk somang*, tidak hanya sekedar hubungan dagang semata, tapi lebih dari itu, terdapat ikatan sosial mereka yang sudah begitu kuat dan mengakar lebih lama. Hal ini yang kurang diperhitungkan oleh program proyek pemerintah sejak masa Orde-lama, Orde-baru, sampai pemerintahan Orde-terakhir. Karena pola dan strategi program pemerintah seperti itu, maka belakangan berdampak kurang baik terhadap para petani karet di Riau, sehingga program tersebut gagal dalam memenuhi esensi tujuan dan sasaran pembangunan yang hakeki.

Para petani mengetahui bahwa program tersebut lebih banyak untuk memenuhi kepentingan politik pemerintah yang mengejar peningkatan devisa dan pertumbuhan ekonomi negara. Karena keinginan pemerintah yang menggebu-gebu tersebut yang justru sering melupakan kepentingan utama, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Karena itu, maka

pada akhirnya petani kurang merasakan manfaat adanya pembangunan sentra-sentra penampungan produksi karet yang dibuat oleh pemerintah di dekat Lokasi kebun petani, sebab selama ini tidak menyentuh langsung kepada kepentingannya, apalagi meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Kegagalan program yang pertama, mendorong pemerintah untuk mengembangkan strategi strategi *kedua* yang melakukan pembinaan perkebunan rakyat dengan membentuk UPP. Salah satu usaha ini di Riau dikenal dengan istilah proyek SRDP yang utamanya ditujukan untuk membangun dan mengembangkan perkebunan karet-rakyat. Sebagaimana program yang pertama, proyek SRDP ini juga kental dengan nuansa “modernisasi”. Oleh karena itu tidak mustahil bahwa untuk melaksanakan kelancaran proyek ini perlu memenuhi persyaratan tertentu dan dana yang diharuskan oleh sistem tersebut.

Dalam pembangunan proyek SRDP ditargetkan peningkatan pendapatan petani harus mencapai minimal US \$ 1.500 per tahun. Artinya proyek ini dikatakan berhasil jika para petani yang dibinanya mampu menghasilkan pendapatan dalam setahun sebesar US \$ 1.500. Untuk itu setiap petani yang ingin menjadi peserta proyek SRDP harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut antara lain petani harus mempunyai kebun karet minimal 2 ha, berusia tidak lebih dari 45 tahun, jarak antara kebun dengan rumah tidak lebih dari 1 km, dsb.

Selain itu dalam pelaksanaannya, ternyata para petani juga masih dibebani dengan persyaratan teknik budidaya yang menurut mereka masih “asing”, meskipun bagi manajemen proyek sudah menjadi standar yang sudah *given* harus dilaksanakan. Standar baku modernisasi perkebunan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menggunakan teknologi baru, seperti memakai bibit unggul, pupuk lengkap, pengendalian hama/penyakit sampai teknik penyadapan.

Secara demikian, singkatnya riwayatnya proyek SRDP ini hampir sama dengan program pertama, yaitu gagal di tengah perjalanan. Persyaratan yang ditetapkan oleh proyek bukan membuat petani senang dan terbantu, tapi sbaliknya justru mereka semakin merasa berat terbebani. Sering pemerintah kurang memperhatikan kendala realita sosial yang dihadapi petani karet di tingkat lokal. Misalnya tentang persyaratan usia yang diharuskan oleh proyek tidak lebih 45 tahun. Padahal kebanyakan yang mengelola perkebunan karet-rakyat adalah para petani yang usianya sudah relatif tua, sebab umumnya para generasi muda lebih suka merantau ke luar desa atau sekolah ke pusat keramaian kota.

Selain itu ada juga kendala dalam teknik penyadapan dan pemeliharaan. Umumnya petani kesulitan untuk menyadap dua kali sehari seperti yang ditentukan oleh proyek. Petani lebih senang menyadap kebun karet sesuaikan dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Artinya jika keluarga kekurangan uang, misal anaknya yang sekolah meminta biaya; maka mereka baru melakukan penyadapan kebun dengan rajin. Dalam hal proses pembangunan perkebunan tersebut, selain Pemerintah kurang memperhatikan kebiasaan-kebiasaan petani yang telah dilakukan secara turun-temurun, juga masih kurang memperhatikan kendala-kendala sosial-kunci yang dihadapi petani. Malah, terkesan Pemerintah cenderung memberantas budaya petani yang telah mentradisi tersebut. Karenanya tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang menerapkan strategi modernisasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat justru akhirnya menemui kegagalan.

Sektor perkebunan karet-rakyat dibangun dengan mengintroduksi berbagai macam teknologi yang mutakhir, semua persoalan yang berkaitan dengan rendahnya produksi karet dan produktivitas lahan dipecahkan secara teoritis yang dianggap paling rasional, sementara semua hal yang bersipat tidak rasional banyak diabaikan. Padahal, tindakan pengabaian terhadap budaya masyarakat ini yang kemudian justru sering menjadikan bumerang dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Akibatnya, semua jenis program dan institusi yang dibentuk oleh pemerintah (formal) untuk melaksanakan program itu tidak mendapat dukungan dari petani dan tidak populer yang akhirnya menemui kegagalan, mati dan bergeletak di tengah jalan, sebelum tujuan utamanya tercapai.

### **Peranan Perkebunan Karet dalam Membangun Masyarakat Petani di Riau**

Konsep pembangunan dewasa ini lebih banyak dimaknai oleh sebagian besar petani hanya sebagai upaya untuk meningkatkan devisa negara dengan jalan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Artinya berhasil atau gagalnya program pembangunan hanya diukur dari indikator ekonomi semata. Padahal kalau saja pembangunan hanya dimaknai sebatas itu, mungkin sejak zaman Orde Lama hingga Orde Baru pembangunan Indonesia sudah nyata menunjukkan kemajuannya. Tapi kenyataannya dapat dilihat dalam pembangunan perkebunan nasional, khususnya dalam pembangunan perkebunan karet. Menurut Mubyarto dan Dewanta (1991), sumbangan ekspor komoditas karet untuk devisa negara sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1925, khususnya dari daerah Sumatera Timur. Sumbangan tersebut terus meningkat seiring dengan peningkatan permintaan karet-alam dunia. Pada awal masa Orde Baru (1971), sumbangan devisa negara dari karet-alam baru sebesar US \$ 22 juta. Kalau dikaitkan dengan penerimaan ekspor

nasional, maka sumbangan dari sektor ini saja mencapai 16%. Pada tahun 1980 penerimaan devisa negara dari sektor perkebunan telah meningkat menjadi US \$ 1.113 juta.

Demikian pula halnya yang terjadi dengan pembangunan perkebunan karet-rakyat di Propinsi Riau. Tujuan pembangunan perkebunan skala mikro adalah untuk meningkatkan produksi yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Sedangkan dalam skala yang lebih besar (nasional/makro) pembangunan perkebunan untuk meningkatkan sumbangan devisa negara dari sektor perkebunan. Untuk itu, kemudian pemerintah mengadakan dan melaksanakan berbagai proyek pembangunan perkebunan karet-rakyat, seperti SRDP, PIR/NES dan PRPTE. Menurut Rusli dkk (1996), sebagian besar komoditas perkebunan yang merupakan komoditas ekspor dihasilkan oleh perkebunan rakyat yang produktivitasnya masih rendah. Memang dengan adanya proyek-proyek perkebunan rakyat tersebut produktivitas karet-rakyat dapat meningkat, dari sebelumnya hanya berkisar antara 300-500 kg/ha/tahun meningkat menjadi 800 kg/ha/tahun.

Namun makna pembangunan sesungguhnya bukan hanya *economic growth* semata. Sebab jika keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari peningkatan indikator ekonomi saja, akan dapat menyesatkan banyak orang. Pada dasarnya hakikat pembangunan tidaklah sesederhana itu. Sebab salah satu makna pembangunan adalah untuk mengadakan perubahan sosial di dalam masyarakat dan pembebasan. Apakah keberhasilan pembangunan tersebut berdampak positif terhadap perubahan masyarakat sekitar dan menjadikan masyarakat lebih otonom, kreatif dan mandiri?. Hal ini perlu ditinjau dan dikaji lebih jauh secara menyeluruh dari berbagai dimensi sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat seutuhnya.

Kalau mencermati makna pembangunan sebagai suatu agen perubahan sosial, maka perlu dilihat sejauh mana derajat pembangunan tersebut membawa dampak terhadap perubahan sosial. Sebab perubahan sosial yang dimaksudkan adalah mengarah kepada suatu perubahan lembaga-lembaga (*institutions*) masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan sistem sosial, seperti nilai sosial, sikap dan pola perilaku masyarakat pedesaan. Artinya pembangunan yang dapat dinilai berhasil tentu tidak hanya mampu menunjukkan perubahan-perubahan terhadap indikator ekonomi semata. Namun lebih jauh dari itu, makna dan keberhasilan pembangunan sesungguhnya dapat langgeng jika mampu melakukan perubahan sosial seperti disebutkan tadi. Jika pembangunan bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, maka mutlak harus melibatkan masyarakat setempat, termasuk mengacuhkan budaya dan norma yang berlaku, sehingga dengan adanya pembangunan, masyarakat merasa diberdayakan, dan tidak hanya dijadikan sebagai subyek pembangunan semata.

Kelembagaan tingkat desa yang dimaksud adalah mencakup semua institusi yang ada di pedesaan, baik lembaga-lembaga formal (organisasi-organisasi) maupun lembaga-lembaga non-formal (kelompok dan pranata sosial). Sebenarnya pemerintah daerah Riau menaruh perhatian yang besar untuk membina lembaga masyarakat dalam upaya menggerakkan pembangunan di berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Dalam rangka menunjukkan kepeduliannya, Pemerintah pusat dan Pemda selanjutnya mengatur (*top-down planning*) lembaga masyarakat di pedesaan dengan mengeluarkan Undang-undang, Kepres/Inpres, dan berbagai perda lainnya (seperti UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kepres No. 4/1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan koperasi/KUD). Selanjutnya diwujudkan dalam lembaga-lembaga formal seperti LMD, LKMD, KUD, Kelompok Tani, Kelompok KB, Kelompok Belajar dll. Diantara berbagai lembaga formal bentukan Pemerintah yang diandalkan untuk menggerakkan pembangunan adalah LKMD dan KUD. LKMD merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di tataran yang paling bawah. Sedangkan KUD diharapkan akan mampu menggairahkan sektor ekonomi produktif di pedesaan.

Kalau dilihat dari hasil penelitian yang berkaitan dengan pembangunan di Propinsi Riau Rusli dkk (1996), maka terlihat bahwa dari 19 LKMD di desa-desa penelitiannya banyak yang tidak efektif. Keberadaan lembaga LKMD di pedesaan hanya sebatas memperlihatkan papan nama saja di halaman Kantor Desa. Sementara gagasan dan kegiatannya untuk menggerakkan masyarakat atau melakukan perubahan di desa masih jauh dari harapan. Demikian pula dengan KUD yang diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian desa, ternyata menunjukkan belum nyata terbukti. Banyak KUD yang belum mampu berfungsi sebagai lembaga pemasaran di daerah pedesaan. Masalahnya banyak KUD tidak mampu membuka jaringan (relasi) lebih luas sampai ke lokasi pusat produksi karet. Rantai pemasaran hasil kebun berupa getah (*ojol*) dari perkebunan rakyat hingga pabrik pengolahan sepenuhnya masih dikuasai oleh para *toke* (tengkulak) yang mampu membuka jaringan kerja ke tingkat paling bawah dan mampu membentuk sistem *patron-client* yang sudah mengakar kuat di tingkat produsen karet di pelosok desa.

Perubahan sosial di pedesaan juga sulit terlaksana, karena pada umumnya lembaga-lembaga formal bentukan Pemerintah itu kurang populer di tengah masyarakat, sehingga keikutsertaan masyarakat desa pun (misalnya menjadi anggota) sangat kecil. Realitas ini sebenarnya cukup beralasan, karena banyak petani menyaksikan terjadi kasus (misalnya penyelewengan dana), sehingga lembaga-lembaga formal Pemerintah di pedesaan reputasinya kurang baik. Bahkan istilah KUD pun sering kali diplesetkan menjadi *Ketuo*



*Untung Dulu*. Fenomena-fenomena yang berkembang inilah akhirnya semakin menyurutkan masyarakat untuk ikut aktif dalam proses pembangunan. Ternyata masalahnya tidak hanya melanda lembaga LKMD dan KUD saja, namun juga sampai kepada Kelompok Tani (KT). Penelitian Rusli dkk (1996) mencatat sekitar 80% KT di Propinsi Riau yang terdapat di ketiga kabupaten besar (Kampar, Bengkalis dan Indragiri Hilir) ternyata masih merupakan KT pemula (Tabel 1). Padahal KT diharapkan sebagai lembaga kunci yang mampu menggerakkan pembangunan pertanian di pedesaan.

Disamping lembaga-lembaga formal, juga ada lembaga non-formal yang telah tumbuh lama berkembang di kalangan masyarakat. Namun ironisnya lembaga tradisional/lokal tersebut tidak pernah atau diabaikan keterlibatannya dalam proses pembangunan. Justru sebaliknya yang sering terjadi di lapangan, banyak sekali kelompok tani yang dibentuk Pemerintah tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya. Karena kelompok formal tersebut dirasakan oleh masyarakat petani bukan sebagai *partner* dalam bekerja, namun hanya dipandang sebagai “*rival*” saja, sehingga petani setempat pun merasa perlu untuk menjaga jarak dan mempertahankan eksistensinya.

Tabel 1. Jumlah Kelompok Tani Menurut Kabupaten/Kodya dan Kelas Perkembangan.

No.	Kabupaten / Kodya	Kelas				
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Jumlah
1.	Indragiri Hulu	381	155	25	-	561
2.	Indragiri Hilir	1.083	183	63	11	1.340
3.	Kepulauan Riau	63	23	-	-	86
4.	Kampar	756	241	57	-	1.054
5.	Bengkalis	776	377	173	14	1.340
6.	Pekanbaru	35	9	-	-	44
Jumlah		3.093	988	318	25	4.424

Sumber: Kanwil Deptan Riau tahun 1992 dalam Rusli dkk.1996

Kalau dicermati, sesungguhnya kelompok non-formal tersebut sudah beradaptasi dan teruji kemampuannya di lingkungan masyarakat setempat. Perkembangannya lebih didorong oleh adanya kebutuhan-bersama, seperti kelembagaan gotong royong yang didasarkan pada tradisi *batobo* yang menjadi ikatan turun temurun, karenanya sampai sekarang keberadaannya tetap masih eksis. Meskipun aktivitas yang dilakukannya berupa pengolahan tanah sampai tahap pemanenan. Dalam hal ini, petani yang tergabung dalam kelompok *batobo* tidak pernah mempersoalkan luas atau sempit lahan yang akan dikerjakannya. Tapi

mereka secara berkelompok mampu menanggung seluruh biaya natura yang dipergunakan selama berlangsungnya kegiatan *batobo* secara sukarela. Jadi kalau Pemerintah mampu membaca kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga non-formal yang ada di pedesaan secara *simbiosis mutualistis*, tidak mustahil program pembangunan Pemerintah yang selama ini banyak berujung dengan kegagalan, akan mendapat sambutan yang bernilai positif dari masyarakat petani di pedesaan Riau.

Upaya mempercepat dan memberikan *stimulus* kepada masyarakat Riau agar mampu meningkatkan produksi kebun dan kesejahteraan keluarganya, selain lembaga-lembaga formal, saat ini Pemerintah juga telah melibatkan perusahaan negara (BUMN) dan swasta yang kemudian membangun perkebunan karet. Awalnya pilihan ini sudah baik, karena perkebunan karet-rakyat telah lebih lama membudaya dalam kehidupan masyarakat Riau. Namun dalam menetapkan strategi selanjutnya untuk diterapkan di lapangan sering mengabaikan kendala sosial yang serius. Misalnya dalam pembangunan sebuah perkebunan. Pemerintah biasanya tidak pernah memikirkan bagaimana fungsi pengawasan bisa dijalankan dengan baik, juga perlunya membangun infrastruktur sarana dan prasarana transportasi. Dampaknya pembangunan perkebunan yang dibangun jauh dari pusat pengawasan pemerintah menjadi suatu daerah yang benar-benar “terisolasi”. Sebab pelaksanaan pembangunan tanpa adanya kontrol dari pemerintah, berarti juga tidak melaksanakan fungsinya, yaitu melibatkan masyarakat untuk memberdayakan mereka. Dengan demikian wajar kalau pihak perusahaan dituduh hanya berfikir untuk mengejar keuntungan kelompoknya sendiri.

Akibat permasalahan isolasi tersebut jika tidak diantisipasi dengan cepat, maka tidak mustahil kemudian pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah hanya akan membuat kesan yang negatif di mata masyarakat. Artinya permasalahan program pembangunan tsb lebih terkesan hanya sebagai *sinterklas* yang membagi-bagikan sarana dan dana, namun tidak memberikan dampak yang nyata dan mengakar pada masyarakat sebagaimana disebutkan Rusli dkk (1996). Selain itu hadirnya berbagai perusahaan swasta juga cenderung sebagai “kelompok luar” yang keberadaannya kurang mengakar pada kehidupan masyarakat lokal (kurang berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi penduduk setempat). Karenanya hadirnya perusahaan swasta sering menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat lokal, dengan alasan etos kerja yang rendah, akhirnya masyarakat setempat tidak ikut dilibatkan dalam pekerjaan. Bahkan langkah yang ditempuh perusahaan pun akhirnya hanya merekrut tenaga kerja dari luar daerah yang dianggap lebih mampu.

## **Orientasi Pembangunan Daerah: Sudut Pandang Baru**

Propinsi Riau luasnya  $\pm 94.562 \text{ km}^2$  dan memiliki situasi geografis khusus, karena Propinsi ini terdiri dari banyak pulau ( $\pm 3.214$  buah) dengan daerah perairannya yang luas (Depdikbud, 1993). Karena itu orientasi dalam membangun daerah (wilayah) untuk meningkatkan kehidupan masyarakatnya juga memerlukan strategi dan kebijakan tersendiri. Dengan demikian sebaiknya strategi dan kebijakan pembangunan yang ditempuh harus berlandaskan realita yang ada. Artinya usaha pembangunan harus dilandasi dengan kenyataan daerah yang sebenarnya dan menggunakan segala kemampuan sumberdaya daerah yang tersedia. Bukan sebaliknya, dengan menyontek konsep pembangunan ala Barat menjadi suatu keharusan, karena kemampuannya mencetak hutang dari luar negeri dianggap suatu prestasi gemilang. Tujuan pembangunan yang hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi tinggi memang tidak selalu salah, tetapi pengalaman telah menunjukkan bahwa tujuan itu sering membuat pandangan kita menjadi kabur dan lupa dengan persoalan pokok yang dihadapi masyarakat petani, yaitu kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan pedesaan yang sesungguhnya, maka semua gaya dan orientasi lama harus segera ditanggalkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan di Riau tentu harus melihat dan memadukan berbagai aspek potensi yang ada di wilayahnya. Kenyataan ini tidak dapat dihindari jika kemudian Propinsi Riau juga memiliki pembangunan yang sifatnya multidimensi. Artinya, di satu sisi Propinsi Riau mempunyai pembangunan yang berdimensi pertumbuhan ekonomi sangat cepat, dan umumnya ada pada sektor industri pertambangan, pengolahan minyak, dan pengolahan kayu. Namun dalam kenyataannya industri-industri ini tidak begitu banyak memiliki pengaruh yang nyata terhadap kehidupan masyarakat. Sementara di sisi lain Propinsi ini juga mengalami permasalahan pembangunan masyarakat suku terasing seperti suku Sakai, Talang Mamak, dan Suku Laut, bahkan akibat cepatnya pertumbuhan pembangunan seperti itu, justru kemudian semakin menyingkirkan dan menyengsarakan masyarakat lokal ini.

Demikian pula dengan pembangunan pertanian, khususnya di subsektor perkebunan di daerah Propinsi Riau juga menghadapi permasalahan yang khas dan kompleks, yaitu di satu sisi pembangunan dan perkembangan di subsektor perkebunan secara ekonomi menunjukkan atau berjalan relatif cepat, tapi di pihak lain masih belum mampu memberikan perubahan dalam kehidupan sosial (pendapatan dan kesejahteraan rakyat). Sepertinya pembangunan tsb tidak membangun dan tidak memberdayakan masyarakat serta lembaga-lembaga lokal yang

sudah ada, sehingga manfaat pembangunan subsektor ini pun akhirnya hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang saja, sementara sebagian besar masyarakat masih tetap belum nyata merasakan hasil pembangunan dimaksud.

Oleh karena itu, dengan realita yang ada, maka sebaiknya dalam mengatasi berbagai kesenjangan dan kemiskinan tersebut, perlu dilihat paling kurang dalam tiga dimensi; *pertama*, pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentunya harus melalui pemanfaatan sumberdaya lokal, terutama yang dikuasai oleh kelompok-kelompok masyarakat kecil (petani); *kedua*, perlunya memberikan kemudahan kepada kelompok petani miskin untuk memperoleh dan memanfaatkan (aksesibilitas) tanah, modal, dan berbagai infrastruktur serta input-input produktif lainnya, dan *ketiga*, perlunya mengembangkan struktur sosial kelembagaan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat, khususnya untuk para petani dan kelompok miskin lainnya agar mereka nantinya mampu mengatasi permasalahannya sendiri, kreatif dan mandiri. Ketiga hal tersebut dalam jangka panjang akan menciptakan kehidupan yang produktif dan diharapkan mampu meningkatkan kesempatan saha dan produktivitas kerja serta pendapatan keluarga petani.

Selain itu perlu juga diperhatikan bahwa, meningkatkan taraf kehidupan petani dan kelompok masyarakat miskin lainnya merupakan bagian integral dari pembangunan yang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan sungguh-sungguh. Dalam hal ini pengaruh aspek sosial dan kelembagaan semakin menekankan pentingnya proses pentahapan kegiatan untuk menanggulangi persoalan tersebut. Oleh karena itu kegiatan untuk meningkatkan kehidupan petani dan kelompok masyarakat miskin tidak dapat dilihat sebagai suatu perhitungan untung dan rugi atau manfaat dan biaya yang diterima saja. Meskipun demikian strategi untuk menanggulangi permasalahan tersebut masih perlu didasarkan pada peningkatan kesempatan kerja/usaha dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Intinya strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang perlu ditempuh adalah yang mampu memacu kemandirian masyarakat. Meskipun pada awalnya memang harus melakukan kemajuan ekonomi daerah sehingga bisa mengurangi kesenjangan untuk dapat memanfaatkan berbagai peluang pembangunan secara terus-menerus. Sebagai konsekuensi dari strategi dari kebijakan tersebut, tentu mengharuskan berbagai lembaga formal (instansi pemerintah) dan lembaga swasta serta masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk melihat kembali peran masing-masing dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan jalur-jalur pemerataan.

Program-program yang perlu dibuat untuk melaksanakan strategi dan kebijakan itu misalnya *pertama*, mengembangkan infrastruktur yang menghubungkan daerah sentra produksi perkebunan (karet) dengan pusat pertumbuhan sehingga mampu membuka isolasi daerah itu. Terbukanya isolasi akan melancarkan komunikasi, sehingga memudahkan informasi, pendidikan, pengawasan dan sebagainya. *Kedua*, mengembangkan kegiatan pertanian rakyat kembali melalui jalur yang benar, misalnya dengan pola intensifikasi dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal serta *dibarengi* dengan pemberdayaan lembaga agribisnis yang ada dengan memperhatikan keterkaitan antar subsistem di tingkat lokal. *Ketiga*, perlu mengembangkan swadaya lokal. Artinya membangun kemampuan masyarakat agar mampu mengatasi masalahnya sendiri secara otonom, kreatif dan mandiri.

Untuk membangun ini, perlu pembinaan dari pihak (lembaga) atas desa yang bersifat multisektoral. Karena pada kenyataannya kepentingan masyarakat (petani) di pedesaan tidak pernah tunggal, melainkan majemuk, sehingga memerlukan pelayanan yang sinergi dan terpadu. Keswadayaan lokal ini juga menyangkut kelembagaan lokal, SDA dan SDM lokal dan berbagai perencanaan di tingkat lokal pula. Kemudian yang *keempat* adalah perlu memadukan seluruh kebijaksanaan dan strategi itu dalam keputusan pemerintah (daerah) yang mungkin dapat direfleksikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Sehingga porsi untuk mengatasi persoalan ketimpangan kehidupan masyarakat dapat ditangani dengan seimbang dengan porsi kegiatan yang ditujukan untuk kegiatan pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Proses pembangunan wilayah (daerah) di Provinsi Riau sering menghadapi banyak masalah yang cukup kompleks. Selain luasnya wilayah dan banyak Pulau, permasalahan muncul karenan disebabkan oleh adanya keragaman aksesibilitas antar daerah, teknologi, sumberdaya manusia dan tingkat perkembangan pembangunan. Keadaan seperti ini lebih kentara di daerah pedesaan. Di mana sebagian besar masyarakat Riau yang tinggal di pedesaan adalah sebagai petani karet-rakyat yang umumnya tingkat kesejahteraan mereka masih dalam kondisi yang memprihatinkan.

Sejauh ini strategi dan langkah kebijakan Pemerintah untuk membangun dan mengembangkan perkebunan karet-rakyat telah dilaksanakan, seperti (a) Pembentukan pusat-pusat pengolahan karet di beberapa daerah sentra produksi dengan tujuan menampung dan mengolah lateks dari hasil perkebunan rakyat dan untuk memperbaiki mutu olahannya,

(b) Melakukan pembinaan perkebunan rakyat dengan membentuk unit pelaksana proyek (UPP) yang lebih populer di Propinsi Riau dikenal dengan proyek SRDP.

Meskipun program ini berfungsi sebagai pembinaan petani-karet secara menyeluruh dari masalah budidaya sampai ke persoalan pemasaran. Tapi dalam perjalanannya masih belum memberi banyak dampak dan manfaat kepada petani kebun, terlebih lagi bagi masyarakat miskin lain di pedesaan. Penyebabnya adalah; strategi pembangunan perkebunan lebih condong/berorientasi kepada peningkatan produksi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan memperbesar devisa negara. Sementara, aspek persoalan sosial kemasyarakatan seperti lembaga-lembaga lokal dan berbagai relasi produksi di tingkat lokal yang terkait langsung dengan upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di pedesaan justru tidak dibangun secara memadai dan terkesan diabaikan.

Hadirnya perusahaan perkebunan besar yang modern, seperti perkebunan milik BUMN dan Swasta yang diharapkan akan mampu memberikan stimulus pada masyarakat untuk lebih produktif, ternyata juga tidak bisa memberikan “apa-apa”. Bahkan kehadirannya justru dianggap sebagai “kelompok lain” oleh masyarakat. Sehingga berbagai program Pemerintah, termasuk yang berkait dengan pembangunan perkebunan rakyat kurang mendapat dukungan di tingkat bawah, dan tidak jarang yang mendapat penolakan dari masyarakat lokal. Pada akhirnya tujuan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, *malah* melahirkan ketimpangan (kemiskinan) baru dalam banyak aspek. Jadi, pilihan strategi pembangunan perkebunan karet-rakyat yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dipandang belum mampu mencapai sasaran yang sesungguhnya, yaitu membangun dan menciptakan masyarakat (petani) agar mereka mampu mengatasi segala persoalannya secara mandiri, kreatif dan otonom.

## **Saran**

Agar pembangunan dapat bergerak dengan baik dan berhasil seperti yang diharapkan, maka pemerintah harus memilih strategi pembangunan yang mampu mengelaborasi berbagai modal dan kekuatan yang ada di tingkat lokal, baik yang berupa SDA, SDM maupun modal-modal sosial lainnya untuk menggerakkan roda pembangunan di Riau. Sebab keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari meningkatnya indikator ekonomi saja. Namun yang lebih penting dari itu adalah model pembangunan yang mampu mengadakan perubahan sosial, sehingga dapat melahirkan masyarakat (petani) yang memiliki kemampuan dalam memecahkan persoalan keluarganya secara otonom, kreatif dan mandiri. Jadi kalau

sudah mencapai tingkatan yang demikian boleh jadi bahwa pembangunan sudah memberikan dampak positif terhadap nilai tambah derajat kesejahteraan hidup petani khususnya dan rakyat banyak pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2003. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS. 2001. *Statistik Penduduk Indonesia 2001*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Depdikbud. 1993. *Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan dalam Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Daerah Riau*. Depdikbud, Jakarta.
- Dirjen Perkebunan, 2004. *Statistik Perkebunan Karet Indonesia 2002-2004*. Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta.
- Dirjen Perkebunan, 2001. *Statistik Perkebunan Karet Indonesia 1999-2001*. Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta.
- Evers Hans Dieter, 1988. *Teori Masyarakat Proses Peradaban dalam Sistem Dunia Modern*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Long, Norman, 1987. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Bina Aksara. Jakarta.
- Mubyarto dan Dewanta, Awan Setyawan. 1991. *Karet Kajian Sosial Ekonomi*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Penebar Swadaya. 1992. *Karet Strategi Pemasaran Tahun 2000, Budidaya dan Pengolahan*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Rusli, Said dkk. 1996. *Pembangunan dan Fenomena Kemiskinan Kasus Profil Riau*. Grasindo. Jakarta.
- Soemardjan, Selo. 1962. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Schoorl, J.W. 1980. *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara Sedang Berkembang*. Gramedia. Jakarta.
- Suwarsono & Alvin So. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Thahar Nasrul. 2000. *Petani Karet Jambi Terbelenggu Kemiskinan*. Harian Kompas, 25 Juli 2000, p.26, Jakarta.